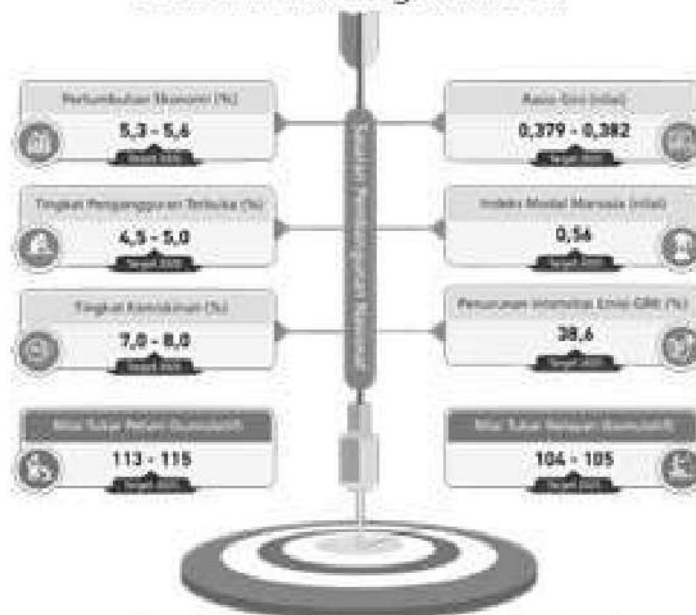




PERUBAHAN RKPD *Rencana Kerja Pemerintah Daerah* KABUPATEN SARMI 2025

BAPPEDA
KABUPATEN SARMI

Gambar 4.2
Sasaran Pembangunan 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan **prioritas nasional** sebagai berikut.

Gambar 4.3
Prioritas Nasional



4.2.2 Arahan RIPPP 2021-2041

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang memuat langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (sustainable development goals).

Dalam dokumen RIPPP dinyatakan bahwa Visi Pembangunan Papua 2041 ***"Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera"***. Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

- a. **Misi-1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
- b. **Misi-2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
- c. **Misi-3:** meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.4

Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

	INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2041
PAPUA SEHAT sasaran : Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93 - 66,14	68,66 - 68,67
	Prevalensi stunting (%)	29,50 - 26,20	10,00
PAPUA CERDAS sasaran: Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11 - 13,13	14,59 - 16,61
	Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76 - 7,69	9,36 - 10,37
PAPUA PRODUKTIF sasaran : Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	Tingkat kemiskinan (%)	27,38 - 21,82	5,99 - 5,00
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84 - 3,33	4,11 - 1,73
	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	10,30	6,30

Dimensi pembangunan yang tertuang dalam RPPPP meliputi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua produktif yang masing-masing dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

a. Papua Sehat

- 1) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- 2) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
- 3) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

b. Papua Cerdas

- 1) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
- 2) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
- 3) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
- 4) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

c. Papua Produktif

- 1) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
- 2) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
- 3) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 4) Ekonomi lokal; dan
- 5) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua

Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. Kondisi perlu meliputi adanya intervensi di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan dan tanah adat/ulayat, kebudayaan dan harmonisasi sosial.

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2025.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025 merupakan satu proses konsolidasi beberapa arahan yang telah diberikan oleh beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya, berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 serta pemetaan terhadap permasalahan serta isu strategis yang mengemuka di Papua. Selain itu, uraian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga sangat terkait dengan tema pembangunan daerah yang disusung pada tahun 2025 seiring dengan adanya faktor- faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua tahun 2025.

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021, disamping isu strategis paling mutakhir yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025 adalah; ***Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.***

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut diatas, Sasaran pembangunan nasional dan Papua Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Target Pembangunan tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Papua
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	4,4 -4,9
2	Kemiskinan	7-8	16 -16,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5	6,3 - 6,8
4	Indeks Modal Manusia	0,56	0,45
5	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,380 -0,383
6	Intensitas Emisi GRK	38,6	59,28

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 yang telah dirumuskan diatas maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 yaitu:

- Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
- Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
- Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2025 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kabupaten Sarmi dimana masa pengabdian Bupati yang habis pada tahun 2022, penentuan Tujuan dan Sasaran disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi tahun 2005-2025, dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Arah kebijakan Kabupaten Sarmi merupakan fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode 2023-2026. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema

dalam setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan amanah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2025 dengan tema ***"Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan"***. Merujuk kepada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sarmi 2005-2025, serta berkembangnya isu-isu strategis yang penting dan mendesak, maka rumusan fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 dapat disampaikan sebagai berikut.

Gambar 4.1.

Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026



4.2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan tahun Ketiga (2025).

Tema pembangunan tahun 2025 adalah ***Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan***.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPD (2025) ini masih fokus pada pembangunan sebagaimana yang dilakukan pada tahun kedua. Optimalisasi pemenuhan infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan, sumber daya listrik, air bersih dan perumahan layak huni dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini bertujuan

mencapai Sarmi yang maju dan sejahtera dalam kebhinekaan sebagaimana yang dirumuskan sebagai visi dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarmi Tahun 2005-2025.

Berdasarkan strategi pengembangan kabupaten/kota menurut RKP 2025, Kabupaten Sarmi masuk dalam wilayah adat Mamta. Adapun strategi pengembangan wilayah Mamta adalah Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau dan wisata bahari. Dalam implementasi kegiatan prioritas tersebut juga perlu mempertimbangkan posisi strategi Kabupaten Sarmi secara Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain berdasarkan wilayah adat, pembangunan Kabupaten Sarmi berdasarkan RKP dilakukan pada koridor pemerataan yang mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi; serta (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan. Dengan pendekatan melalui koridor pemerataan Kabupaten Sarmi mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (no-one left behind).

Arah Pengembangan Wilayah Sarmi dalam RTRW Papua dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua tahun 2024-2026, Kabupaten Sarmi terletak di wilayah adat Mamta dengan kondisi topografi pesisir. Dalam sistem perkotaan di Provinsi Papua, terdapat Perkotaan di Kabupaten Sarmi yang memiliki kedudukan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), serta berperan sebagai pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah. Kabupaten Sarmi memiliki posisi strategis secara regional karena ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Pengelolaan Ekonomi Rendah Karbon, Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, Kawasan Strategis Sosial Budaya. Hal

ini menjadi strategis karena mendukung kebijakan umum pengembangan wilayah di Provinsi Papua tahun 2024-2026 yaitu "Green Growth berbasis wilayah adat", khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 Pembangunan Kabupaten Sarmi diprioritaskan pada:

1. Peningkatan SDM yang berkualitas;
2. Pemenuhan dan Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (Jalan Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih);
3. Penguatan kemampuan SDM berbasis potensi unggulan wilayah;
4. Pemantapan kehidupan yang aman, damai rukun, bersatu dan demokratis;
5. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia 64,20
2. Pertumbuhan ekonomi 4,79 persen
3. Pendapatan Per Kapita 73,21 Juta
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,57 persen
5. Persentase Penduduk 13,15 persen
6. Indeks Gini Rasio 0,401

Prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Persandingan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Papua serta prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi sebagaimana dalam matriks berikut ini:

Tabel 4.2

Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Prov. Papua, dan Kabupaten Sarmi tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SARMI Tahun 2025
Tema Pembangunan	"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.	Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan.
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,	- (PP3) Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	- (PP2) Pemenuhan dan Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (Jalan/Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih).
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,	- Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM	- (PP1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		- (PP3) Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasa	- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	- (PP2) Pemenuhan dan Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar (Jalan/Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih).
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas.	- (PP3) Penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	- Peningkatan Keamanan dan Ketertiban - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- (PP4) Pemantapan kehidupan yang aman, damai rukun, bersatu dan demokratis; - (PP5) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan Masyarakat